

ANALISIS IKLIM INVESTASI DAERAH (STUDI KASUS: KOTA SEMARANG)

REGIONAL INVESTMENT CLIMATE ANALYSIS (CASE STUDY: SEMARANG)

Bagas Haryotejo

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Nomor Telp./Faks: +62 812 9963004; e-mail: bagas.haryotejo@kemendag.go.id

Diterima: 9 Januari 2012, Direvisi: 16 Februari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

Abstrak

Iklim investasi suatu negara atau suatu daerah mencerminkan kinerja kebijakan pemerintah dan peraturan dalam mengendalikan baik konsep dan tingkat operasional. Secara umum, saat ini iklim investasi di Indonesia tidak dalam kondisi memuaskan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan indikator kemajuan atau kondusifitas iklim investasi di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan tujuan khusus adalah, survei pada indikator iklim investasi berbagai kunci secara rinci, baik dari segi peraturan dan pelaksanaannya yang dapat diukur, dianalisis dan disajikan secara transparan dan lebih mudah untuk melakukan antisipasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei mengenai aspek bisnis (mikro) dengan Daerah Jawa Tengah sebagai daerah studi. Untuk analisa, sedang mempertimbangkan berbagai aspek makro yang mendasarinya. Hasil pembobotan iklim investasi, untuk melihat tingkat kepentingan atau skala prioritas diperoleh, lima indikator prioritas dinilai dampak/efek luas pada iklim industri, yaitu: 1) lisensi indikator (0,146); 2) keamanan kondisi (0,146); 3) kondisi lingkungan bisnis (0,127); 4) layanan infrastruktur publik (0,114) dan hukum tenaga kerja; 5) (0,102). Sementara indikator dianggap berpengaruh adalah akses ke pembiayaan korporasi (dengan nilai bobot 0,059). Hasil penilaian iklim investasi di Semarang dengan menggunakan 10 indikator tertimbang menunjukkan bahwa Semarang telah dihargai 3,058 dan dikategorikan sebagai cukup kondusif. Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar adalah keamanan kondisi (3,441), pelayanan infrastruktur publik (3,030), dan akses pembiayaan (2,923), sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah pajak (2,631), kondisi lingkungan bisnis (2,742), dan kondisi jalan (2,864). Implikasi kebijakan adalah bahwa kemungkinan perbaikan iklim investasi, iklim investasi masih sangat diperlukan untuk meningkatkan, setidaknya dengan meningkatkan kinerja berbagai indikator yang disebutkan sebelumnya.

Kata kunci: iklim investasi, peraturan, indikator

Abstract

Investment climate of a country or a region reflects the performance of the relevant government policies and regulations in controlling both concept and operational level. In general, currently the investment climate in Indonesia is not in a satisfactory condition. The main objective of this research is to develop indicators of progress conduciveness or the investment climate in Semarang, Central Java. While the specific aim are, survey on various key investment climate indicator in detail, both in terms of regulation and its implementation that can be measured, analyzed and presented in a transparent and easier to do anticipate policy. Research method used, was a survey on the business aspects (micro) with the Region of Central Java as a study area. For the analysis, was considering various aspects of the underlying macro. The result of weighting the investment climate, to see the degree of importance or priority scale obtained, five priority indicators are assessed an impact / pervasive effect on the industry climate, namely: 1) licensing indicator (0.146); 2) the security conditions (0.146); 3) business environment conditions (0.127); 4) public infrastructure services (0.114); and 5) labor laws (0.102). While the indicator is considered to be no effect is access to corporate financing (with weight value 0.059). The result of the assessment of investment climate in Semarang by using 10 weighted indicators shows that Semarang, had valued 3.058 and categorized as quite conducive. Three indicators that provide the largest contribution are security condition (3.441), public infrastructure services (3.030), and financing access (2.923), while the three indicators that have the lowest value is taxation (2.631), business environment conditions (2.742), and road condition (2.864). Policy implication is that the chances of improving the investment climate, the investment climate still very necessary to improve, at least by improving the performance of various indicators mentioned earlier.

Keywords: investment climate, regulation, indicators

PENDAHULUAN

Berbicara tentang iklim investasi tidak terlepas dari daya saing yang dihasilkan dari suatu aktivitas ekonomi. Naik turunnya iklim investasi suatu negara

atau suatu daerah dalam keterbandingan dengan negara atau daerah lain mencerminkan kinerja pemerintahan yang bersangkutan dalam mengendalikan kebijakan dan peraturan, baik dalam tataran konsep maupun pada tataran operasional. Untuk Indonesia, telah banyak

pihak-pihak yang melakukan pengukuran daya saing dan Iklim Investasi atau iklim investasi, dengan berbagai kriteria dan indikator yang disusun. Laporan tahunan yang disajikan menunjukkan bahwa daya saing Iklim Investasi di Indonesia senantiasa mengalami penurunan (jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya).

Kajian yang dilakukan oleh World Economic Forum (WEF) tahun 2009 dengan mengukur daya saing Indonesia dengan 5 (lima) indikator yang signifikan, tiga faktor pada tataran makro dan dua indikator pada tataran mikro. Indikator tataran makro meliputi: 1) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro; 2) buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat layanan; dan 3) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Sedangkan tataran indikator mikro, meliputi: 1) rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan; dan 2) lemahnya iklim persaingan usaha.

Survey World Bank tahun 2008, dengan menggunakan beberapa indikator antara lain: memulai kegiatan usaha, regulasi ketenagakerjaan, pajak dan kepatuhan serta penyelesaian kepailitan menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga. Kajian lainnya dilakukan oleh The International Institute for Management Development (IMD). IMD menyatakan bahwa rendahnya daya saing industri di Indonesia disebabkan oleh buruknya kinerja perekonomian Indonesia, yang ditandai oleh empat hal pokok, yaitu: 1) buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerja di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga; 2) buruknya efisiensi kelembagaan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, buruknya berbagai peraturan dan perundangan untuk Iklim Investasi kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka institusi publik yang masih banyak tumpang tindih; 3) lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari produktivitas yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumberdaya keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional; dan 4) keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan, bahwa a) pengeluaran untuk pungutan dan biaya layanan umum menambah biaya *overhead* sekitar 8,7%-11,2%; b) *cost of money* yang relatif tinggi, tercermin dari suku bunga yang saat ini sangat tinggi; c) administrasi perpajakan yang belum optimal; d) kandungan impor untuk produk ekspor sangat tinggi. Nilai impor bahan baku, bahan antara (*intermediate*) dan komponen untuk seluruh industri meningkat dari 28% pada tahun 2006 menjadi 30% pada tahun 2009; e) lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Nilai tambah industri nasional relatif rendah, meskipun dalam komposisi ekspor mulai terjadi peningkatan produk ekspor berteknologi menengah dan tinggi; f) kualitas SDM relatif rendah; g) iklim

persaingan yang kurang sehat, di mana banyak sub-sektor industri yang beroperasi dalam kondisi "mendekati" monopoli; yang ditunjukkan oleh tingginya Indeks Konsentrasi untuk dua perusahaan (CR2); h) struktur industri masih lemah; i) peranan industri kecil dan menengah (termasuk industri rumah tangga) masih minim; dan j) sebaran industri yang terpusat di Pulau Jawa.

Secara umum, pengembangan iklim investasi perlu difokuskan pada upaya untuk mengurangi berbagai kendala yang menghambat kinerja perdagangan dan investasi. Sebagai langkah awal untuk memperbaiki keadaan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mempunyai indikator yang dapat digunakan secara berkala untuk memantau iklim investasi baik dalam kerangka perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey pada aspek bisnis (mikro) dengan daerah Semarang, Jawa Tengah sebagai kawasan studi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek makro yang mendasarinya.

Tujuan analisis ini adalah menyusun indikator kondusifitas atau kemajuan iklim investasi di Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan negara Indonesia. Sedangkan tujuan khusus, yaitu melakukan survey atas berbagai indikator iklim investasi utama secara terinci, baik dari segi peraturan maupun implementasinya yang dapat diukur, dianalisis dan dipresentasikan secara transparan sehingga lebih mudah untuk melakukan antisipasi kebijakannya.

Survey lapangan dibatasi terhadap kegiatan sektor industri dan jasa, khususnya sektor perekonomian yang secara nasional dan regional mempunyai sumbangan yang berarti terhadap perekonomian, mempunyai daya serap tenaga kerja yang besar, mempunyai potensi ekspor, dan saat ini cenderung mengalami kelesuan usaha. Sedangkan komoditi ditetapkan dari lima kelompok industri manufaktur dan satu sektor jasa. Kelima kelompok komoditi tersebut adalah 1) alas kaki dan sepatu; 2) tekstil dan produk tekstil; 3) makanan dan minuman; 4) elektronik; dan 5) bahan dan barang kimia. Pemilihan kelima kelompok komoditi tersebut didasarkan pada beberapa hal, antara lain penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, nilai ekspor yang cukup tinggi, nilai tambah yang tinggi, dan beberapa merupakan bagian dari program pengembangan 10 komoditas andalan prioritas pemerintah. Sedangkan pada sektor jasa, diwakili oleh perhotelan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Iklim Investasi, Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang

Iklim investasi didefinisikan sebagai kebijakan, institusional, dan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi (Stern, 2002). Terdapat tiga faktor utama yang menyusun iklim investasi, yaitu: 1) Fundamental

Makro—dalam hal ini adalah stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar, sosial, dan stabilitas politik; 2) Pemerintahan dan Kelembagaan—transparansi dan efisiensi dari kebijakan; perpajakan; legal sistem; kekuatan sektor finansial; serta kondisi ketenagakerjaan; dan 3) Infrastruktur—transportasi (jalan dan pelabuhan), telekomunikasi, listrik dan air.

Dalam konteks ini, kiranya Kota Semarang perlu menyadari bahwa sebagai sebuah kota metropolitan ternyata masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan kota-kota metropolitan lainnya di Indonesia, terutama dilihat dari sisi profesionalitas pengelolaan aset-aset daerah yang dimilikinya. Kenyataan ini terlihat pada penanganan dan pengelolaan aset-aset tersebut yang cenderung masih menunjukkan kelemahan terutama pada aspek manajemennya. Hal ini setidaknya membawa pengaruh akan rendahnya kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya akan membawa dampak negatif pada bidang perekonomian daerah.

Rendahnya kontribusi terhadap PAD tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Semarang perlu segera berbenah diri dan melakukan manajemen dalam pengelolaan aset-aset daerah tersebut. Karena pengelolaan aset-aset daerah saat ini dinilai kurang efektif dan cenderung menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan keinginan tersebut Pemerintahan Kota Semarang bermaksud mengajukan bentuk kerjasama kepada investor/swasta dengan beberapa opsi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2001, yaitu:

1. Sewa Menyewa, yakni penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada Pihak Ketiga dalam hubungannya sewa-menyewa dengan ketentuan Pihak Ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.
2. Pengguna-usahaan, yakni pendaya-gunaan Barang Daerah oleh Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO), yakni perikatan antara pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga, pemerintah daerah menyediakan barang daerah dan Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya, keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya *sharing* masing-masing.

Selain itu guna mempermudah investasi, Pemerintah Kota Semarang juga lebih mendukung iklim investasi dengan mempermudah perijinan—perijinan yang ada. Hal tersebut terlihat dari cenderung makin banyaknya perijinan yang dikeluarkan terhadap perijinan bangunan maupun perijinan HO dari tahun 2001-2009. Dari kedua perijinan tersebut perijinan bangunan terjadi penurunan pengeluaran ijin pada tahun 2003, sedangkan perijinan HO terjadi penurunan jumlah ijin pada tahun 2004, namun penurunan tersebut tidak terlalu besar. Pertumbuhan ekonomi daerah yang didasarkan pada pertumbuhan produktivitas, yaitu total produktivitas yang seimbang antara pertumbuhan investasi modal dan

pertumbuhan sumber daya manusia (*human capital/knowledge*) akan menghindari pertumbuhan ekonomi yang semu. Pertumbuhan ekonomi secara efisien (produktif) menjadi modal dasar bagi persaingan regional dan global. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pertumbuhan usaha pada tingkat daerah merupakan sumber penciptaan lapangan kerja dan sekaligus sumber kesejahteraan. Saat ini pemerintahan telah mencanangkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi (terutama dari sumber modal asing) untuk menciptakan lapangan kerja, pendapatan bagi masyarakat serta menciptakan dampak berantai (*multiplier effect*) tumbuhnya iklim investasi.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kondusifitas iklim investasi di suatu daerah adalah biaya transaksi yang mencakup: 1) biaya untuk memulai/ mengembangkan sebuah sistem; 2) biaya yang terukur dalam nilai yang dipertukarkan; 3) biaya perlindungan hukum; 4) biaya penyelenggaraan perjanjian.

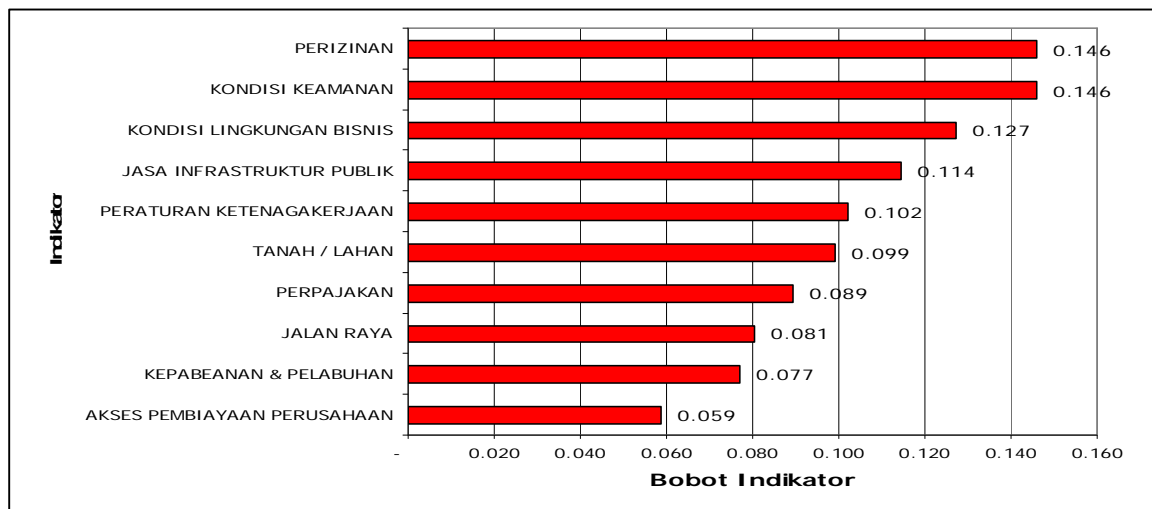
Kajian KPPOD (2003) terhadap daya tarik investasi daerah menggunakan beberapa variabel—konsep yang mempunyai variasi nilai/intensitas/jumlah yang menggambarkan atribut dari variabel tersebut. Variabel yang mempengaruhi daya tarik investasi suatu daerah adalah 1) kelembagaan; 2) sosial politik; 3) ekonomi daerah; 4) tenaga kerja dan produktifitas; dan 5) infrastruktur fisik.

Masing-masing daerah memiliki kekhasan atas potensi, baik dari aspek kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan produktivitas maupun ketersediaan infrastruktur. Kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan perekonomiannya tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Penetapan Indikator Iklim Investasi

Struktur hierarki iklim investasi industri dibuat dalam tiga level, yang masing-masingnya memberikan pengaruh terhadap level lainnya secara bertingkat dari bawah ke atas. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan pengembangan dari Indikator yang digunakan IFC, World Bank dalam mengukur *competitiveness* 152 negara di dunia. Dimana dalam penelitian ini Indikator merupakan hierarki level 1, yang terdiri atas sepuluh indikator (yang ditetapkan) dan memberikan pengaruh terhadap level di atasnya (tujuan: iklim investasi industri). Sub indikator merupakan hierarki level 2, yang masing-masing merupakan faktor pengaruh bagi indikator-indikator di level atasnya. Parameter ukur, merupakan hierarki level 3, yang memberikan ukuran-ukuran pada sub indikator (level di atasnya). Kemudian dilakukan pembobotan atas indikator-indikator.

Gambar 1 menunjukkan bahwa indikator-indikator utama yang mempengaruhi iklim investasi industri adalah indikator perizinan (14,60%), yang dipengaruhi pula oleh kondisi keamanan (14,60%), kondisi lingkungan bisnis (12,70%), jasa infrastruktur publik (11,40%) dan peraturan ketenagakerjaan (10,20%). Jika dicermati bahwa distribusi prioritas atas indikator-indikator iklim investasi tidak menunjukkan penilaian yang berbeda nyata.



Gambar 1. Hasil Pembobotan Indikator Iklim Investasi Industri.

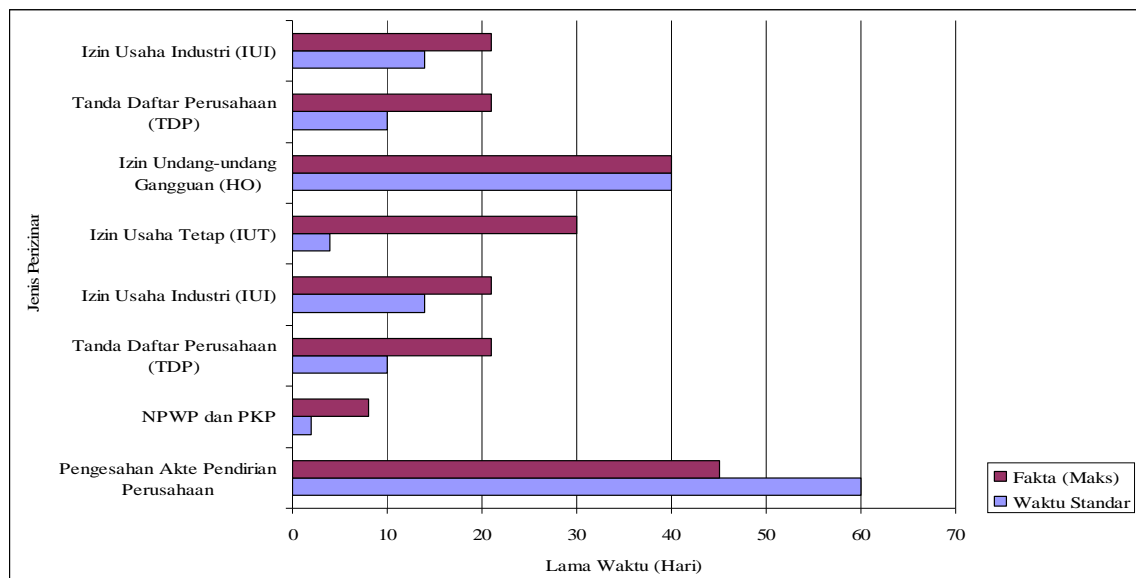
Indikator yang paling tidak menjadi prioritas adalah akses pembiayaan perusahaan (5,59%) karena pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel sebagian besar adalah PMA dan PMDN. Selain itu, kenyataan bahwa untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan yang cukup sulit memberikan dampak tersendiri bagi pelaku usaha yang semakin tidak berharap banyak atas bantuan pembiayaan dari perbankan. Ditambah dengan suku bunga kredit yang cukup tinggi, semakin memberikan implikasi bahwa akses pembiayaan perbankan semakin tidak menarik dan tidak menjadi prioritas.

1. Indikator Perizinan

Berdasarkan fakta lapangan, perizinan yang ada di Kota Semarang adalah sebagai berikut: 1) Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan, 2) NPWP dan PKP, 3) Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru, 4) Angka pengenal Importir Terbatas (APIT), 5) Izin Tenaga Kerja Asing, 6) SP Fasilitas Pabean Barang Modal, 7) SP Fasilitas Pabean Barang Baku/Penolong, 8) Rekomendasi AMDAL, 9) Persetujuan UKL/UPL, 10) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL), 11) Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP), 12) Izin Usaha Pariwisata (ITUP), 13) Izin Usaha Tetap (IUT), 14) Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)/Izin Lokasi, 15) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 16) Surat Izin Pasar Modern, 17) Izin Undang-Undang Gangguan, 18) Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 19) Tanda Daftar Perusahaan, 20) Izin tempat Menyimpan Bahan Bakar, 21) Izin Usaha Industri (IUI), 22) Tanda Daftar Gudang (TDG), 23) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 24) Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung, 25) Angka Pengenal Importir Produsen (APIP), 26) Angka Pengenal Importir Terdaftar (APIT), 27) Angka Pengenal Importir Umum (APIU), 28) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), 29) Ekspor Terdaftar Tekstil Dan Peroduk Tekstil (ETTPT), 30) Surat Keterangan Ekspor TPT, 31) Izin Import Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru, 32) Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga/Asosiasi, 33) Surat Keterangan Asal (SKA), 34) Izin Dispensasi Pengguna Jalan, 35) Izin Dispensasi Bongkar Muat Barang, 36) Izin Operasi Angkutan

Karyawan, 37) Izin Pengelolaan Limbah Padat, 38) Izin Penyimpangan Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, 39) Izin Kerja Malam Wanita, 40) Pengesahan Peraturan Perusahaan, 41) Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama, 42) Surat Izin Pengeboran Air (SIPA), dan 43) Izin Penyelenggara Reklame. Perizinan yang diatur oleh Perda adalah 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 2) Surat Ijin Sewa Beli, 3) Ijin Usaha dan Rekomendasi Pasar Modern, 4) Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri, 5) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 6) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, 7) Ijin Parkir, dan 8) Tanda Daftar Organisasi Niaga/Asosiasi DPD Kota. Dari segala perizinan yang ada di Kota Semarang dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan baik dalam hal waktu maupun biaya. Penyimpangan waktu rata-rata adalah 82,5%, yang diperlihatkan pada Gambar 2.

Penyimpangan biaya terjadi pada beberapa jenis perizinan yang disurvei, antara lain: pengesahan akte pendirian perusahaan yang seharusnya berbiaya Rp. 200.000,00, pada kenyataannya harus dibayar hingga Rp. 300.000,00; Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang seharusnya Rp. 100.000,00 dibayarkan antara Rp. 125.000,00–Rp. 750.000,00; dan beberapa jenis perizinan yang sebenarnya tidak berbiaya, misalnya IUI, NPWP dan PKP, dibayarkan masing-masing hingga Rp 150.000,00 dan Rp. 500.000,00. Berdasarkan persepsi pelaku usaha untuk parameter ukur atas indikator perizinan merefleksikan bahwa kondisi yang masuk ke dalam kategori buruk adalah kelayakan biaya dan waktu standar, yang dinilai masih kurang layak pelaku usaha. Beberapa parameter lain yang berada pada kategori sedang, tetapi cenderung buruk adalah kesesuaian biaya dengan standar, kemudahan persyaratan, dan tingkat kemudahan perizinan. Dilihat dari sub indikatornya, semuanya masuk ke dalam kategori sedang/cukup. Beberapa yang cenderung buruk adalah biaya perizinan, jangka waktu dan kejelasan prosedur perizinan. Hasil penilaian indikator perizinan di Kota Semarang adalah 2,876 dan termasuk pada kategori sedang (selang interval 2,600–3,400), dengan kecenderungan mendekati buruk. Beberapa kondisi yang cenderung buruk dan perlu perhatian dalam pembenahannya adalah kelayakan



Gambar 2. Penyimpangan Waktu Terhadap Waktu Standar Perizinan.

waktu dan biaya, kejelasan prosedur dan kemudahan persyaratan perizinan.

2. Indikator Perpajakan

Beberapa pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha diantaranya adalah pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel dan lain – lain. Pajak tersebut merupakan pajak lain disamping pajak yang biasanya berlaku untuk usaha seperti pajak penghasilan (pasal 21), pajak penghasilan (pasal 25) dan pajak pertambahan nilai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang, didominasi dari pajak daerah sekitar 57,61% dan retribusi daerah sebesar 29,07%. Dalam pengurusan pajak beberapa pelaku usaha masih menggunakan jasa dari konsultan pajak; dengan waktu yang diperlukan untuk pengisian form pajak tahunan bervariasi antara 2-5 jam hingga 30 hari, tergantung dari skala usaha dan kompleksitas transaksi. Dalam pelaporan pajak tahunan tersebut pelaku usaha memerlukan biaya antara Rp. 8–Rp. 8,5 juta bahkan untuk bidang perhotelan mencapai Rp. 12 juta ditambah dengan 10% pajak hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai pengajuan restitusi PPN dinilai cukup mudah dalam pengajuannya, yang juga dipengaruhi oleh pemahaman dan kemudahan prosedur yang berlaku. Waktu yang diperlukan untuk pengurusan restitusi PPN berkisar antara 2–4 bulan, dengan biaya yang dikeluarkan antara 2–10 % dari nilai restitusi PPN itu sendiri. Penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator perpajakan di Kota Semarang menunjukkan bahwa, parameter ukur yang masuk ke dalam kategori buruk adalah jenis dan biaya pajak/retribusi daerah, serta kesesuaian biaya dengan standar yang berlaku. Sedangkan parameter ukur lainnya, seperti pemahaman dan kemudahan prosedur, kelayakan waktu dan kelayakan biaya berada pada kategori sedang/cukup (meskipun menunjukkan

kecenderungan buruk). Parameter kesesuaian waktu dengan standar dinilai cukup baik, dan memiliki kecenderungan baik. Sebagaimana parameter ukur, sub indikator juga memperlihatkan kondisi yang relatif sama, antara lain jenis dan tarif pajak/retribusi daerah dan biaya pelayanan perpajakan masih berada pada kategori buruk. Sedangkan jangka waktu perpajakan masuk ke dalam kategori cukup baik. Hasil penilaian indikator perpajakan di Kota Semarang adalah 2,631 dan termasuk pada kategori sedang (selang interval 2,600–3,400), dengan kecenderungan buruk. Secara umum, kondisi perpajakan di Kota Semarang belum cukup mendukung, terutama pada pajak dan retribusi daerah yang dinilai masih terlalu banyak, sehingga perlu upaya kaji ulang terhadap jenis dan besaran pajak yang ditetapkan. Selain itu, biaya pengurusan pajak juga perlu dibenahi terkait dengan upaya pengurangan pungli di indikator ini.

3. Indikator Peraturan Ketenagakerjaan

Untuk tahun 2009, TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di Kota Semarang sebesar 63,45% sedangkan tingkat kesempatan bekerja, yaitu perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan penduduk usia kerja pada tahun 2009 adalah sebesar 40,81%. Dari sejumlah 16.484 orang pencari kerja yang mendaftar di Kota Semarang pada tahun 2009, sebagian besar jenjang pendidikannya adalah SLTA (39,39%), yang diikuti oleh Sarjana (36,70%), Sarjana Muda (14,15%), SLTP (6,09%) dan SD (3,68%). Terlihat adanya keseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan jenjang SLTA dengan Sarjana, yang menunjukkan ketersediaan tenaga kerja teknis dan profesional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kota Semarang.

Upah buruh terendah yang dibayarkan di Kota Semarang berkisar antara Rp. 500.000,00–Rp. 600.000,00, sedangkan Upah Minimum Kota (UMK)

yang berlaku di Kota Semarang saat ini adalah sebesar Rp. 586.000,00. Berdasarkan hal tersebut maka untuk UMK yang ditetapkan tersebut sebagian sudah dipenuhi oleh pelaku usaha, namun beberapa lainnya masih membayarkan upah di bawah UMK yang berlaku. UMK tersebut dinilai oleh pelaku usaha relatif cukup. Namun dari tenaga kerja sendiri, jumlah tersebut masih kurang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, sehingga perlu ada upaya untuk menaikkan UMK tersebut sesuai dengan standar hidup layak. Pengaruh dari tidak sesuainya UMK yang diberlakukan pelaku usaha menyebabkan perselisihan yang terjadi antar perusahaan dengan buruh. Kebanyakan perselisihan yang terjadi antara perusahaan dan tenaga kerja terjadi akibat tuntutan kenaikan upah dan perselisihan dengan organisasi buruh. Namun perselisihan tersebut sebagian besar tidak mengakibatkan PHK bagi karyawan, karena dari perolehan penelusuran lapangan rata-rata kasus PHK pada 3 bulan terakhir tidak ada. Kalaupun ada kasus PHK, lebih disebabkan oleh tindakan indisipliner oleh tenaga kerja itu sendiri. Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator peraturan ketenagakerjaan di Kota Semarang menunjukkan kondisi yang masuk ke dalam kategori sedang/cukup. Dua parameter ukur yang memiliki kecenderungan buruk adalah besaran penetapan UMK dan pemahaman terhadap peraturan. Demikian pula hasil penilaian pada level sub indikator yang memberikan hasil penilaian pada kategori sedang, tetapi untuk UMK/UMP cenderung mendekati buruk. Hasil penilaian sub indikator ketenagakerjaan di Kota Semarang adalah 2,882 dan termasuk pada kategori sedang (selang interval 2,600–3,400) dengan kecenderungan mendekati baik. Kondisi yang perlu mendapatkan pembenahan adalah UMK/UMP dan juga pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan.

4. Indikator Jalan Raya

Panjang jalan di seluruh kota Semarang mencapai 2.762.621 Km, dimana bila dilihat dari jenis permukaannya 52,12 % sudah diaspal, sedangkan dari kondisinya 44,87 % dalam keadaan baik; 32,48 % dalam keadaan sedang dan sisanya dalam keadaan rusak. Intensitas kendaraan yang banyak melintasi jalan-jalan di Kota Semarang menyebabkan tingkat kemacetan di jalan cukup tinggi. Salah satu titik yang menjadi titik kemacetan yaitu Jl. Simongan dan Kaligawe. Dampak kemacetan yang terjadi adalah besarnya biaya transportasi tambahan yang harus dikeluarkan, terlebih adanya pungli oleh petugas di jalan raya dan jembatan-jembatan timbang. Selain itu, kemacetan ini dapat memberikan dampak kerusakan produk dan komplain pelanggan. Dalam distribusi produk maupun untuk kegiatan usaha lainnya sebagian besar menyatakan belum memiliki kendaraan angkut sendiri, sehingga sangat tergantung pada kendaraan umum maupun sewaan. Untuk kendaraan sewaan memerlukan biaya sebesar Rp 100.000,00 atau diperhitungkan berdasarkan berat barang, misalnya Rp 1.500,00/kg. Beberapa perusahaan memiliki kendaraan angkut sendiri, antara 2-3 buah. Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jalan raya di Kota Semarang menunjukkan bahwa parameter ukur yang masuk ke dalam kategori buruk adalah kelayakan biaya dengan standar. Beberapa

parameter lainnya, misalnya kepadatan jalan dan kesesuaian biaya dengan standar, meskipun masuk ke dalam kategori sedang, tetapi kecenderungan yang diperlihatkan mengarah pada kategori buruk. Penilaian atas sub indikator menunjukkan bahwa biaya pemanfaatan jalan masuk ke dalam kategori buruk. Sedangkan kelancaran arus lalu lintas, meskipun masuk ke dalam kategori sedang, tetapi kenyataannya cenderung buruk, yang disebabkan tingkat kepadatan jalan tinggi. Hasil penilaian untuk indikator jalan raya di Kota Semarang adalah 2,864 dan termasuk dalam kategori sedang (selang interval 2,600–3,400). Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya pengurangan intensitas pungli dalam hal biaya pemanfaatan jalan, serta melakukan upaya penertiban untuk mengurangi intensitas kemacetan di jalan raya.

5. Indikator Kepabeanan dan Kepelabuhan

Pelabuhan laut Tanjung Mas di Kota Semarang merupakan gerbang dalam aktivitas distribusi bahan baku dan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Tahun 2009 tercatat kunjungan kapal sebanyak 3.508 kapal, dengan jumlah barang yang diturunkan tercatat 3.844.828 ton, dan barang yang dimuat tercatat 2.164.403 ton. Untuk pelayaran luar negeri, kunjungan kapal pada tahun 2009 tercatat 799 kali, dengan volum bongkar barang sebesar 1.647.730 ton; dan volum muat barang sekitar 1.835.886 ton. Selain pelabuhan laut, pelabuhan udara Ahmad Yani yang ada di Kota Semarang juga cukup mendukung aktivitas bisnis bagi pelaku usaha. Volum bongkar barang di pelabuhan udara ini pada tahun 2009 tercatat 3.677.810 kg; dan volum muat sekitar 3.426.103 kg.

Penelusuran lapangan menunjukkan bahwa lama waktu yang diperlukan untuk pengiriman maupun penerimaan barang sekitar 2-3 hari. Biaya yang dikeluarkanpun bervariasi tergantung dari besar maupun banyaknya barang yang akan dikirimkan, antara Rp. 100.000,00-Rp. 1.000.000,00. Pemeriksaan barang di pelabuhan udara maupun laut yang berupa *scanning* maupun *sampling* memerlukan waktu 1-3 hari dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- per kontainer. Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kepabeanan dan kepelabuhan di Kota Semarang menunjukkan bahwa semua masuk ke dalam kategori sedang. Beberapa di antaranya menunjukkan kecenderungan buruk, misalnya kualitas pelabuhan, tingkat kemudahan prosedur, dan dukungan armada angkutan. Sedangkan lainnya cenderung mendekati kategori baik. Penilaian atas sub indikator juga memberikan kondisi yang relatif sama, dimana semuanya berada pada kategori cukup baik/sedang dengan kecenderungan buruk pada ketersediaan kepabeanan dan kepelabuhan, serta kejelasan prosedur. Hasil penilaian untuk indikator kepabeanan dan kepelabuhan di Kota Semarang adalah 2,906 dan termasuk kategori sedang (selang interval 2,600–3,400), dengan kecenderungan baik. Namun hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dibenahi adalah kualitas pelabuhan, dukungan armada angkutan dan tingkat kemudahan prosedur.

6. Indikator Jasa Infrastruktur Publik

Ketersediaan jasa infrastruktur publik di Kota Semarang yang meliputi listrik, telepon, air, dan gas menjadi prioritas utama dalam mendukung kelancaran aktivitas bisnis. Kebutuhan listrik misalnya, akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah perusahaan dan pabrik di Kota Semarang; demikian pula dengan kebutuhan telepon, air dan gas. Peningkatan kebutuhan listrik harusnya diimbangi dengan pelayanan yang baik. Tetapi pada kenyataannya gangguan listrik yang terjadi cukup besar. Selama tahun 2006, sebanyak 15.572 laporan gangguan untuk berbagai jenis gangguan. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2009, dimana tercatat 12.303 laporan gangguan, maka mengalami kenaikan sekitar 26.57%.

Kebutuhan air bersih, yang diperlukan sekitar 1,4 juta jiwa penduduk di Kota Semarang baru terlayani sekitar 40 %. Sedang, sisanya (60%) untuk memenuhi kebutuhan air bersih mengambil dari air bawah tanah. Padahal pengambilan air bawah tanah secara besar-besaran, khususnya untuk keperluan industri dapat berpotensi menyebabkan penurunan tanah (*land subsidence*). Antisipasi hal tersebut, pemerintah daerah merencanakan membangun Bendungan (Dam) Jatibarang, di Kali Kreo. Ketinggian bendungan ini diperkirakan akan mencapai 77 meter dan panjang puncak 200 meter; dengan tubuh bendungan bertipe *Rockfill Dam*. Kapasitas genangan diperkirakan total 20,4 juta m³, kapasitas pengendali banjir 3,1 juta m³, kapasitas air baku 10,5 juta m³, dan kapasitas endapan 6,8 m³. Diharapkan bendungan itu nantinya bisa memasok air bersih dengan kapasitas 2.000 lt/detik. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih, fungsi lain dari bendungan ini adalah sebagai pengendali banjir yang sering terjadi di daerah-daerah Perumahan Dosen Undip Dewi Sartika, Sampangan Madukoro, Panjangan Semarang Indah, Bojongsalaman Kokrosono, dan sudewa Tanah Mas. Sementara itu potensi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kota Semarang meliputi Kali Kreo sampai ke Waduk (53 Km²), seluruh Kali Kreo (70 km²), Kali Kripik (34 km²), dan Kali Garang (100 km²) sehingga luas DAS termasuk Banjir Kanal Barat adalah 204 Km². Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator jasa infrastruktur publik di Kota Semarang menunjukkan kondisi yang berada pada kategori sedang. Dua parameter yang sebenarnya cenderung berada pada kategori buruk adalah kelayakan biaya standar pelayanan dan kelayakan jasa infrastruktur publik. Sedangkan parameter ukur lainnya cenderung baik. Penilaian sub indikator menunjukkan bahwa semua berada pada kategori sedang, dan memiliki kecenderungan ke arah kategori baik. Hasil penilaian untuk indikator infrastruktur publik di Kota Semarang adalah 3,030 dan termasuk kategori sedang (selang interval 2,600 – 3,400), dengan kecenderungan baik. Dua hal yang perlu diperhatikan adalah kelayakan standar dan biaya layanan pada jasa infrastruktur publik.

7. Indikator Perolehan Tanah/Lahan untuk Investasi

Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373.70 Km² yang terdiri atas 10,59% tanah sawah 89,41% bukan lahan sawah. Ketersediaan tanah/lahan ini sangat

penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan lokasi strategis dan tentunya bebas dari segala bentuk konflik dengan masyarakat. Kebutuhan lahan/ tanah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar bagi pelaku industri, baik dalam bentuk hak milik, HGB, hak pakai dan lain sebagainya. Penelusuran yang dilakukan diperoleh informasi bahwa harga tanah per m² berkisar antara Rp. 150.000,00-Rp. 500.000,00 untuk industri dan untuk perhotelan sekitar Rp. 3.000.000,00-Rp. 5.000.000,00 per m². Harga NJOP sendiri untuk lokasi-lokasi tertentu berkisar antara Rp. 200.000,00 - Rp. 5.000.000,00 per m². Meskipun pada beberapa lokasi harga tanah relatif mahal, tetapi dalam hal perolehannya relatif mudah. Apalagi didukung oleh kejelasan dari peraturan yang mendukung tentang perolehan lahan untuk kegiatan industri dan perdagangan.

Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator tanah/lahan di Kota Semarang terlihat bahwa kondisi yang masih belum cukup baik (buruk) atas parameter ukur tanah/lahan adalah tingkat kelayakan harga tanah yang dinilai masih cukup tinggi. Parameter ukur lainnya menunjukkan kondisi sedang, kecuali pada tuntutan masyarakat/komplain yang cenderung tinggi. Penilaian atas sub indikator memberikan gambaran bahwa kedua-duanya memperlihatkan kondisi yang berada pada kategori sedang. Namun untuk pengadaan tanah/lahan cenderung mendekati kategori buruk. Hasil penilaian untuk indikator tanah/lahan di Kota Semarang adalah 2,833 dan masuk kategori sedang (selang interval 2,600-3,400). Hal yang perlu diperbaiki adalah kelayakan harga tanah/lahan yang harus dikendalikan untuk mengurangi lonjakan harga yang terlalu tinggi.

8. Indikator Kondisi Keamanan

Kondisi keamanan di Kota Semarang relatif aman, yang diperlihatkan oleh jumlah kasus/kejadian yang hanya tercatat 597 kasus pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 652 kasus atau terjadi kenaikan sekitar 9,12% pada tahun 2009. Demikian pula pengakuan pelaku usaha bahwa dalam tiga bulan terakhir hanya tercatat 2 kali kejadian/konflik. Meskipun cenderung terganggu, tetapi tetap dirasakan aman oleh pelaku usaha. Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator kondisi keamanan di Kota Semarang menunjukkan bahwa jenis dan besaran biaya keamanan di Kota Semarang masuk ke dalam kategori cukup baik sedangkan intensitas sengketa dinilai rendah dan respon aparat keamanan yang cepat sehingga kedua parameter ukur ini masuk ke dalam kategori baik. Kondisi yang sama ditunjukkan oleh sub indikator, dimana biaya keamanan masuk ke dalam kategori cukup baik dan sengketa atau konflik masuk dalam kategori baik. Hasil penilaian untuk indikator kondisi keamanan di Kota Semarang adalah 3,441 dan masuk kategori baik (selang interval 3,400-4,199). Kondisi tersebut sangat mendukung iklim investasi di Kota Semarang.

9. Indikator Akses Pembiayaan Perusahaan

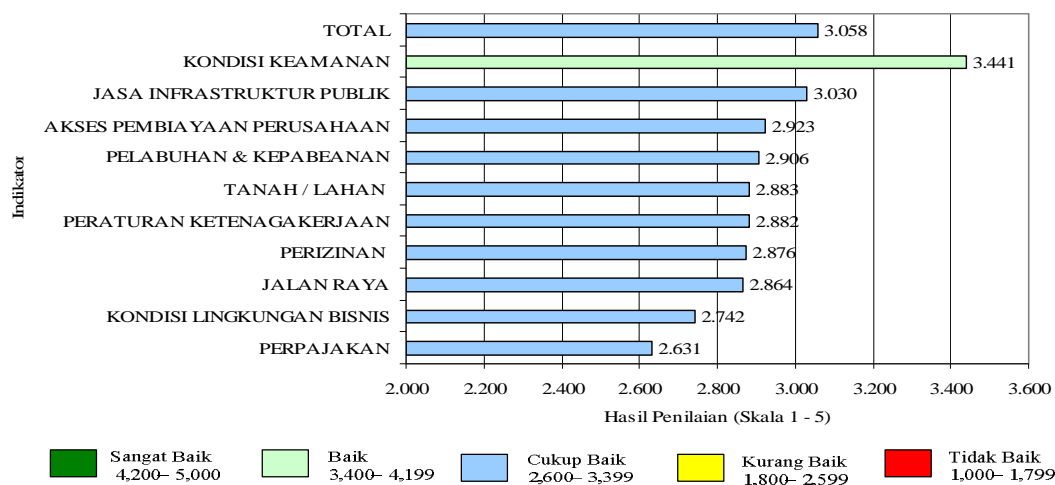
Di Kota Semarang tercatat 6 bank pemerintah dan 20 bank swasta, yang dapat mendukung dan memfasilitasi pembiayaan perusahaan. Namun kecenderungan menunjukkan terjadinya penurunan

dalam penyaluran dana. Pada tahun 2009 tercatat kredit perbankan (rupiah dan valas) yang disalurkan sebesar Rp. 437,71 miliar rupiah dan kredit usaha kecil (rupiah dan valas) mencapai Rp. 928,91 miliar rupiah. Rata-rata pertumbuhan kredit perbankan tersebut, sepanjang periode 2005-2009 sebesar 4,68%. Pertumbuhan tersebut relatif lebih rendah dibandingkan pada kredit usaha kecil yang mencapai 6,45%. Hasil penilaian parameter ukur dan sub indikator atas indikator akses pembiayaan perusahaan menunjukkan semua parameter ukur pada indikator akses pembiayaan perusahaan masuk ke dalam kategori sedang/cukup. Namun pada parameter untuk persyaratan kredit dan penilaian agunan cenderung mendekati kategori buruk. Kondisi yang sama diperlihatkan oleh sub indikator, dimana kedua-duanya masuk ke dalam kategori sedang, dengan kecenderungan pada proses kredit mendekati kategori buruk. Hasil penilaian untuk indikator kondisi akses pembiayaan perusahaan di Kota Semarang adalah 2,923 dan masuk kategori sedang (selang interval 2,600-3,400). Prioritas yang dapat dilakukan untuk akses pembiayaan perusahaan adalah upaya untuk mempermudah persyaratan kredit dan memberikan penilaian atas agunan secara layak.

baku, akses pasar, dan pembinaan pemda. Sedangkan komitmen pemda, meskipun masuk ke dalam kategori sedang, tetapi pada kenyataannya justru lebih mendekati kategori buruk. Tiga parameter ukur yang mendekati baik adalah akses teknologi, akses tenaga kerja, dan akses distribusi. Hasil penilaian untuk indikator kondisi lingkungan Bisnis di Kota Semarang adalah 2,742 dan masuk kategori sedang (selang interval 2,600-3,400), dengan kecenderungan buruk. Tampaknya komitmen dan pembinaan pemda menjadi kunci utama untuk menciptakan kondisi lingkungan bisnis yang kondusif, terutama dalam mengatasi kendala akses bahan baku dan penciptaan peluang-peluang pasar baru.

11. Iklim Investasi Kota Semarang

Hasil penilaian atas iklim usaha di Kota Semarang adalah 3,058 dan termasuk ke dalam kategori sedang (interval nilai 2,600-3,399). Tiga indikator yang memberikan kontribusi terbesar terhadap iklim investasi di Kota Semarang adalah kondisi keamanan (3,441), jasa infrastruktur publik (3,030), dan akses pembiayaan perusahaan (2,923). Sedangkan tiga indikator yang memiliki nilai terendah adalah perpajakan (2,631), kondisi lingkungan bisnis (2,742), dan jalan



Gambar 3. Kondisi Iklim Investasi di Kota Semarang.

10. Indikator Kondisi Lingkungan Bisnis

Lingkungan bisnis di Kota Semarang menunjukkan kondisi yang sangat beragam dilihat dari akses usaha dan kebijakan pemda. Akses usaha memperlihatkan situasi dimana akses terhadap bahan baku dan akses pasar dinilai sulit. Akses bahan baku ini terkait dengan mahalnya harga bahan baku, termasuk juga bahan penolong; sedangkan akses pasar terkait dengan kondisi pasar yang cenderung lesu. Pada sisi yang lain, akses terhadap tenaga kerja, teknologi, dan distribusi cenderung memberikan situasi yang lebih kondusif. Keluhan yang masih dirasakan oleh pelaku usaha adalah komitmen pemda yang dirasakan masih belum cukup memadai. Hal ini diperlihatkan oleh pembinaan-pembinaan usaha yang masih sangat kurang. Berdasarkan penilaian ada tiga parameter ukur yang masih berada pada kategori buruk, yaitu akses bahan

raya (2,864). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.

SIMPULAN

Semarang memiliki keistimewaan, setidaknya ditunjukkan oleh dirasakannya kondisi keamanan yang baik dalam melaksanakan kegiatan usaha komersial. Indikator "kondisi keamanan" (nilai 3,441) menduduki tempat teratas dibandingkan dengan indikator lainnya di Kota Semarang. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya intensitas konflik/perselisihan, penanganan konflik yang cepat, apabila terdapat kejadian sengketa, serta diterimanya jenis dan besarnya biaya kewan yang dinilai cukup layak. Hal-hal ini cukup mendukung keberlangsungan usaha karena rendahnya gangguan, baik secara internal maupun eksternal. Seluruh indikator lainnya masuk dalam kategori sedang dengan indikator

”perpajakan” pada posisi terbawah (nilai 2,631) yang masih membuka peluang perbaikan untuk lebih mendorong investasi dan peningkatan usaha di wilayah ini.

Pemerintah dengan partisipasi pengusaha diharapkan dapat menghasilkan berbagai instrumen kebijakan untuk lebih menggairahkan dunia usaha, meningkatkan kesejahteraan karyawan/tenaga kerja dan sekaligus memperbaiki taraf hidup masyarakat setempat. Dinas-dinas/instansi terkait setempat seyogyanya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan usaha perdagangan berbagai komoditas unggulan lokal. Kearifan lokal (*local wisdom*) yang kini menjadi kecenderungan sejumlah daerah pada era otonomi/desentralisasi untuk menggerakkan ekonomi wilayah perlu dipahami dan dikembangkan secara dinamis oleh setiap daerah, termasuk Kota Semarang yang mungkin memiliki kearifan dalam bidang produksi tekstil atau kepariwisataan. Lembaga eksekutif (kantor/instansi kotamadya) dan legislatif (DPRD tingkat kotamadya) perlu dilibatkan dan bergerak seirama untuk mewujudkan komitmen dan pembinaan yang selayaknya dilakukan bagi para pengusaha untuk tujuan yang lebih besar, khususnya terkait dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pembukaan lapangan kerja baru. Konteks ini dapat dikaitkan dengan program pembangunan jangka menengah Kota Semarang dalam rangka pengurangan kemiskinan di tingkat perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Productivity Organization. 2004. *Total Factor Productivity Growth: Survey Report*, Tokyo: Asian Productivity Organization..
- Claros, Augusto López, et al. 2009. *The Global Competitiveness Report 2004-2006: Policies Underpinning Rising Prosperity*, England: World Economic Forum/ Palgrave Macmillan.
- Doing Business 2008. 2008. IFC (International Finance Corporation), World Bank Group.
- Firdausy, Carunia Mulya. November 2009. *Productivity Performance in Developing Countries: Country Case Studies Indonesia*, Austria: United Nations Industrial Development Organization,
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2003. *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia 2003 Persepsi Dunia Usaha: Peringkat 200 Kabupaten/Kota di Indonesia*, Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Michael E. Porter and Scott Stern. 2002. “Innovation: Location Matters” *MIT Sloan Management Review*, Summer 2002; Vol. 42, No. 4
- Porter, Michael E., et al. 2002. *The Global Competitiveness Report 2001-2002*, England: World Economic Forum/ Palgrave Macmillan.
- The International Institute for Management Development. 2009 *IMD World Competitiveness Yearbook 2009*, Lausanne, Switzerland: The International Institute for Management Development.

